

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

(Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa
Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat – Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

SRI YUNITA
NIM: 10875004208

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2 0 1 2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

(Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa
Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)

ABSTRAK

**Oleh
SRI YUNITA**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Selain itu, program ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka populasi penelitian ini adalah anggota PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kecamatan dan desa yang berjumlah 58 orang. Karena terbatasnya jumlah populasi maka semua populasi dijadikan sebagai sampel, dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan melalui observasi, kuesioner, serta wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah dalam bentuk naskah dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu kebanyakan (66,09%) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip (PNPM) Mandiri Perdesaan, bahkan ada juga responden yang menyatakan sangat sesuai yakni (4,60%), namun walaupun begitu masih ada juga responden yang menilai pada kategori cukup sesuai (25%), dan yang menilai kurang sesuai (4,31%), sedangkan belum sesuai tidak ada sama sekali. Oleh karena itu disarankan pemerintah harus lebih perhatian lagi terhadap program ini agar masyarakat bisa merasakan setiap pembangunan yang dilaksanakan, sehingga dapat bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Disamping itu pemerintah harus melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan evaluasi yang didasari pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TELAAH PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pembangunan	15
2.2. Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.3. Pengawasan	26
2.4. Evaluasi	28
2.5. Hipotesis.....	37
2.6. Variabel Penelitian	38
2.7. Defenisi Konsep	39
2.8. Konsep Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	44

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3. Jenis dan Sumber Data	45
3.3.1. Data Primer	45
3.3.2. Data Sekunder	46
3.4. Populasi dan Sampel	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5.1. Observasi.....	49
3.5.2. Kuisisioner (Angket).....	49
3.5.3. Wawancara.....	49
3.6. Analisis Data	50

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Rambah Hilir	51
4.2. Gambaran Umum Desa Rambah Hilir	53
4.2.1. Sejarah Desa Rambah Hilir	53
4.2.2. Visi dan Misi Rambah Hilir	54
4.2.3. Kelembagaan Desa Rambah Hilir.....	54
4.2.4. Monografi Desa Rambah Hilir.....	58
4.2.4.1 Kependudukan.....	58
4.2.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender	59
4.2.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	59
4.2.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ...	60
4.3. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan.....	61

4.3.1. Identitas Responden	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Hasil Penelitian	73
5.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	73
5.1.1.1 Tolak Ukur Pembangunan.....	73
5.1.1.2 Prinsip Evaluasi.....	82
5.2. Pembahasan.....	93
5.2.1 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Program Pembangunan Sarana dan Prasana (Fisik) di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.....	93
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	98
6.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kegiatan Bidang Pembangunan Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu-----	9
Tabel III.1	Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Desa -----	47
Tabel III.2	Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Kecamatan -----	48
Tabel IV.1	Jumlah Aparat Pemerintah Menurut Desa Tahun 2011 -----	52
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Desa Rambah Hilir Berdasarkan Gender Tahun 2010-----	59
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Desa Rambah Hilir -----	59
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan-----	60
Tabel IV.5	Jenis Kelamin Responden -----	71
Tabel IV.6	Tingkat Pendidikan Responden-----	71
Tabel IV.7	Masa Kerja Responden Menjadi Anggota PNPM Mandiri Perdesaan-----	72
Tabel V.1	Tanggapan Responden Tentang Kekayaan Rata-Rata-----	74
Tabel V.2	Tanggapan Responden Tentang Pemerataan-----	76
Tabel V.3	Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Kehidupan dalam Kesejahteraan Masyarakat-----	78
Tabel V.4	Tanggapan Responden Tentang Keseimbangan-----	79
Tabel V.5	Tanggapan Responden Tentang Kesiambungan -----	80
Tabel V.6	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Yang Dilaksanakan di Desa Rambah Hilir -----	81
Tabel V.7	Tanggapan Responden Terhadap Prinsip Obyektifitas Dan Professional -----	83

Tabel V.8	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Transparan-----	84
Tabel V.9	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Partisipatif -----	85
Tabel V.10	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Akuntabel-----	87
Tabel V.11	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Berorientasi solusi---	88
Tabel V.12	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Terintegrasi-----	89
Tabel V.13	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Berbasis Indikator Kinerja-----	90
Tabel V.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Prinsip- Prinsip Evaluasi -----	91
Tabel V.15	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Rambah Hilir -----	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat moderen. Hal ini juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut.

Pembangunan dan pembinaan masyarakat pedesaan memang harus menjadi pusat perhatian pemerintah dan kita semua, karena daerah pedesaan merupakan daerah integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun masyarakat pedesaan berarti pula membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan demikian pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia harus menjadi pusat perhatian yang lebih serius dalam pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang

mencakup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin. (Sumodiningrat:2007)

Inti yang terkandung dalam ketiga kebijakan tersebut di atas yaitu kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan pembangunan yang lestari, kebijakan yang berpijak pada peningkatan peran serta masyarakat (partisipasi), produktifitas rakyat dan efisiensi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat perlu dipahami sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional sehingga mampu secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Suharto 2006:18). Keyakinan itu perlu terus ditingkatkan dan dimasyarakatkan. Namun keyakinan saja tidak cukup, harus ada langkah nyata untuk menterjemahkan dalam implementasinya.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Menko/Kesra/VII/2007, mulai Tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri perdesaan, PNPM Mandiri perkotaan

serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan yang dinilai paling miskin di Indonesia. Tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Dalam menjalankan programnya, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, maksudnya masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi, maksudnya masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.

- c. Desentralisasi, adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin, adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin
- e. Partisipasi, adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi
- f. Kesetaraan dan keadilan gender, adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
- g. Demokratis, adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat
- h. Transparansi dan Akuntabel, adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif

- i. Prioritas, adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- j. Keberlanjutan, adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau terdiri dari 13 desa, dengan jumlah penduduknya yaitu sebanyak 7869 KK. Mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, pedagang kecil, dan industri rumah tangga. Adapun produk unggulannya adalah padi, karet dan kelapa sawit.

Kecamatan ini telah berpartisipasi dalam PPK sejak Tahun 2001, dan memasuki Tahun 2007 kecamatan ini berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan program pemberdayaan masyarakat ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di perdesaan dengan menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat, sebesar Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar per kecamatan. Sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari pemerintah (berupa rupiah murni APBN/APBD, dan pinjaman luar negeri) dan lembaga swasta dan swadaya masyarakat.

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan program pemerintah pusat, kemudian diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, karena perspektif pemberdayaan masyarakat dan sekaligus pemberdayaan pemerintah lokal, dengan menyangkut pergeseran kekuasaan pengambilan keputusan publik, dari pola sentralisasi menuju pola desentralisasi. Jadi pelaku-pelaku PNPM Mandiri Pedesaan itu mulai dari Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Berdasarkan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan. Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ini mulai dari tingkat desa sampai kepada tingkat nasional. Adapun pengelompokan pelaku PNPM Mandiri Pedesaan sebagai berikut:

1. Pelaku Tingkat Desa terdiri dari:
 - a Kepala Desa
 - b Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK)
 - d Tim Penulis Usulan (TPU)
 - e Tim Pemantau
 - f Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (KPMD)
2. Pelaku Tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a Camat
 - b Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
 - c Tim Verifikasi (TV)

- d Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 - e Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
 - f Fasilitator Kecamatan (FK)
 - g Pendamping Lokal (PL)
 - h Tim Pengamat
 - i Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)
 - j Setrawan Kecamatan
3. Pelaku Tingkat Kabupaten terdiri dari:
- a Bupati
 - b Tim Koordinasi PNPM Mandiri (TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kab)
 - c Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJO-Kab)
 - d Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan.
 - e Setrawan Kabupaten.
 - f Fasilitator Kabupaten (Fas-Kab)
 - g Pendamping UPK
4. Pelaku Tingkat Provinsi terdiri dari:
- a Gubernur
 - b Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi (TK-PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi)
 - c Penanggung Jawab Operasional Provinsi (PTO-Prov)
 - d Konsultan Manajemen Provinsi (KM-Prov)
 - e *Province-Based Monitoring* (PBM)
5. Pelaku PPK Tingkat Nasional terdiri dari:

- a Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan Nasional (TK-PNPM Mandiri Pedesaan Nasional)

Jika di tinjau dari kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, maka kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan terdiri dari:

1. Kegiatan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan gedung-gedung dan lain-lain yang sifatnya infrastruktur.
2. Kegiatan perluasan kesempatan dan peluang usaha yang terdiri dari : Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yaitu aktifitas masyarakat pedesaan di sektor riil bisa berupa usaha yang memproduksi suatu bahan, bidang penjualan atau pemasaran maupun yang berbentuk jasa, kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, yaitu kegiatan dari kelompok perempuan di masyarakat pedesaan dalam mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga diantara anggota-anggotanya.
3. Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat, kegiatan ini meliputi: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pelatihan dan Bantuan Manajemen Untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah di bidang Sarana/Prasarana dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun perbaikan sarana dan prasarana. Dan yang menjadi sasaran dalam kegiatan PNPM

Mandiri Perdesaan ini masyarakat yang kurang mampu yang tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tersebut.

Tabel I.1 :Kegiatan Bidang Pembangunan Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

N o.	Tahun	Jenis Kegiatan	Unit	Ukuran (Pxl)	Jumlah dana (Rp)
1.	2006	Posyandu	5	6 m x 5 m	Rp 171.802.250,-
2.	2007	-	-	-	-
3.	2008	Semenisasi Jalan	1	600m x 5 m	Rp. 150.664.600,-
4.	2009	-	-	-	-
5.	2010	Gedung PAUD	2	54 m ²	Rp 168.714.600,-
6.	2011	Gedung PAUD	3	54 m ²	Rp 204.346.300,-

Sumber : Kantor Kecamatan Rambah hilir Tahun 2011

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Rambah Hilir telah ada pada Tahun 2006. Pada Tahun 2006, pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan adalah 5 unit Gedung Posyandu dengan panjang 6 meter dan lebar 5 meter, dan dananya sebesar Rp 171.802.250,- , yang lokasinya terletak di dusun Pasar, Tanjung Pura Indah, Kulim Jaya dan Pasir Panjang. Pada Tahun 2007 di desa Rambah Hilir tidak terdapat alokasi dana program pembangunan sarana dan prasarana. Di Tahun 2008, 1 unit semenisasi jalan dengan ukuran 600m dan 5 m dan dana dari pembangunan tersebut adalah sebesar Rp. 150.664.600,- lokasi pembangunan tersebut di dusun Pasar dan Kulim Jaya. Dan 2009 di desa Rambah Hilir tidak terdapat alokasi program pembangunan sarana dan prasarana. Dan di Tahun 2010,

2 unit pembangunan gedung PAUD dengan ukuran 54 m² dan dana dari pembangunan tersebut adalah sebesar Rp168.714.600, lokasi pembangunan tersebut di dusun Pasar dan Kulim Jaya. Di Tahun 2011, kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan 3 unit pembangunan gedung PAUD dengan ukuran 54 m² dan dana dari pembangunan tersebut adalah sebesar Rp 204.346.300, lokasi pembangunan tersebut di dusun Pasir Panjang, Suka Mulya dan Tanjung Pura Indah.

Pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun diperdesaan antara lain berupa jalan, jembatan dan gorong-gorong. PNPM Mandiri Perdesaan juga membangun sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), pasar, dan pos pelayanan kesehatan diperdesaan. Dalam bidang pendidikan yang dilakukan, diantaranya berupa pembangunan gedung sekolah, rehabilitas gedung sekolah, dan penyediaan peralatan sekolah.

Dalam Bidang Kesehatan, langkah awal yang dikembangkan difokuskan pada upaya sosialisasi kegiatan kepada masyarakat. Targetnya, agar masyarakat mengenali adanya masalah dan kebutuhan kesehatan. Kegiatan yang dapat dikembangkan PNPM Mandiri Diantaranya : Penyuluhan kesehatan, Penyediaan pelayanan kesehatan, Kesehatan Lingkungan, dan Pembiayaan kesehatan mandiri.

Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh penulis, masalah yang terjadi dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan yang dialami di desa Rambah Hilir adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kegunaan posyandu. Meskipun gedung tersebut sudah ada sebelumnya tetapi belum dapat digunakan sebagaimana mestinya, hal itu disebabkan karena

kurangnya pengawasan yang mengakibatkan ketidaklayakan gedung tersebut untuk digunakan dan kurangnya sosialisasi dari aparat kecamatan. Selain itu gedung yang sudah ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan kegiatan posyandu. Seperti kurangnya fasilitas yang seharusnya ada di gedung tersebut, contohnya tempat duduk, lingkungan yang kurang sehat, dan lain-lain. Di bidang pendidikan, alat permainan paud masih kurang dan kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas sekolah yang mengakibatkan kerusakan terhadap peralatan. Ini terjadi pada PAUD, dimana adanya permainan yang tidak dapat digunakan lagi oleh anak-anak PAUD tersebut.

Masalah-masalah tersebut terjadi karena prinsip-prinsip evaluasi kurang berjalan dengan baik, dimana masih ada prinsip evaluasi yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan.

Berdasarkan fenomena di atas untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI (Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitiannya yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pembangunan Sarana/Prasarana Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi pada umumnya, Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

2. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi dari pihak-pihak yang melakukan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang sama.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini seperti teori pembangunan, teori Pemberdayaan Masyarakat, teori pengawasan, teori evaluasi dan penjelasan PNPM Mandiri Pedesaan, juga berisi hipotesis, variabel penelitian, dan konsep operasional.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum Kecamatan Rambah Hilir, gambaran umum Desa Rambah Hilir, Penjelasan Mengenai PNPM Mandiri Perdesaan.

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari identitas responden, tanggapan responden terhadap pelaksanaan (PNPM) Mandiri Perdesaan khususnya pada program pembangunan sarana dan prasarana.

BAB VI. PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*) (Siagian.SP, 2005:4).

Menurut Siagian.SP (2005:4-5), menyatakan ada tujuh ide pokok pembangunan yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional.
7. Semua hal yang telah disinggung diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Sebenarnya administrasi pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmu dalam rumpun administrasi negara dengan fokus proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu nasional dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah ketika menghadapi tantangan dengan memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Adapun pengertian dari administrasi pembangunan

yaitu:”Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”. Ciri-ciri dari administrasi pembangunan adalah :

1. Lebih memberikan perhatian kepada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi masyarakat yang baru berkembang.
2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan yang efektif.
3. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik/berorientasi masa depan.
4. Lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintahan dan berfungsi sebagai *development agent*.
5. Lebih mendekat kepada substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang.
6. Administrator dalam aparaturnya juga merupakan penggerak perubahan (*change agent*).
7. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah.

Tugas pembangunan merupakan tugas semua komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata. Namun demikian, peranan pemerintah sangat dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional (P. Siagian, 2005:142-149), adalah :

1. Peran Selaku Stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang kondusif didalam masyarakat baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh kedepan” (*quantum leap*).

2. Peran Selaku Inovator

Merupakan produk kreativitas dari pemerintah. Pemerintah memberikan bebas pajak untuk program-program yang sifatnya untuk pembangunan. Kesemuannya itu berarti bahwa sistem, prosedur dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukn adalah yang bersifat “*problem-solving*” dan “*action-oriented*”. Yang dimaksud dengan pendekatan demikian ialah kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga ”terapi” yang digunakan tidak hanya mampu “mengobati” gejala-gejala yang timbul, akan tetapi menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga ke akarnya.

3. Peran Selaku Modernisator

Untuk menjadikan negara maju harus ada usaha untuk memodernisasikan masyarakat. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern, Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri kepada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan *de jure*. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang “nasibnya”, kesediaan mengambil resiko, dan orientasi masa depan serta bersedia menerima perubahan.

4. Peran Selaku Pelapor

Pemerintah menjadi sebuah model dalam kehidupan masyarakat. Dimana pemerintah harus memainkan peranan selaku pelapor dalam

berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, selaku pelapor, aparat pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat.

5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Pemerintah melakukan kegiatan swadaya dan swasembada.

Menurut Arif Budiman (2000:4), yang bisa menjadi tolak ukur bahwa pembangunan disuatu daerah berhasil adalah:

1. Kekayaan Rata-rata

Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut setiap tahunnya.

2. Pemerataan

Cara mengukur pemerataan, jika 40% dari jumlah penduduk miskin menerima kurang dari 12% dari GNP maka ketimpang dianggap tinggi dan jika 40% dari jumlah penduduk termiskin menerima antara 12-17% dari GNP maka pertimpangan dianggap sedang, tetapi apabila 40% dari jumlah penduduk termiskin menerima lebih dari 17% dari GNP maka ketimpang dianggap rendah.

3. Kualitas Kehidupan

Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*). Tolak ukur PQLI ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur 3 indikator yaitu: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, rata-rata prorsentasi buta dan melek huruf.

4. Keseimbangan / Kerusakan Lingkungan

Pembangunan yang harus memperhatikan lingkungan, contohnya lumpur lapindo.

5. Kestinambungan / *Continuity*

Dimana pembangunan yang ada dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Negara Indonesia saat ini tengah menerapkan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan perundang-undangan No. 32 Tahun 2004 yang pengganti penyempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian Widjaja (2002:7) menyatakan bahwa :

“Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dengan prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan

kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat”.

Pembangunan selain menjadi kewajiban masing-masing pemerintahan di daerah pemerintah pusat juga berkewajiban melaksanakan kebijakan secara nasional. Dalam rangka efektifitas konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan (Sufian, 2003:5) menyatakan sebaiknya meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan. Upaya-upaya besar tersebut merupakan bagian dari konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan perdesaan yang konsektual, antara lain :

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa, melalui upaya pemberdayaan koperasi dan bahan pertanian, masukan modal, penyediaan teknologi, penataan kembali sistem produksi dan distribusi dan pemasaran produk pedesaan.
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat pedesaan, melalui pendidikan dan pelatihan serta proses pembelajaran. Upaya ini sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan gizi.
- c. Memfungsikan semua lembaga-lembaga yang ada termasuk instansi terkait yang bertugas sebagai pelapor (*agen*) pembangunan pedesaan.
- d. Membimbing dan mengarahkan masyarakat pedesaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif, serta memberikan contoh dalam kegiatan perkebunan, pertanian perikanan dan lain-lain dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e. Membangun sarana-prasarana perdesaan serta memberikan kemudahan bagi para investor nasional dan internasional untuk berinvestasi di pedesaan
- f. Mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan kondisi dan struktur tanah, potensi alam dan potensi masyarakat serta kondisi permintaan pasar.

Dalam Trilogi pembangunan mengandung 3 unsur pokok yang merupakan 3 dimensi artinya mencerminkan 3 segi permasalahan dalam pembangunan sebagai suatu proses kegiatan secara terus-menerus yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kepada usaha untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di bidang-bidang yang semakin meluas dalam masyarakat secara keseluruhan.
2. Pemerataan, dalam kaitannya dengan pendapatan nasional tersebut sampai seberapa jauh hasil produksi nasional berada dalam jangkauan daya beli sebagian besar penduduk yang ingin membeli sejumlah hasil produksi guna memenuhi kehidupannya.
3. Stabilitas nasional, kebijaksanaan pembangunan yang menuju pada dua sasaran kembar diatas tadi memerlukan suasana kehidupan masyarakat yang stabil yang merupakan syarat pokok bagi usaha pembangunan yang kontiniu (Zulkarnain Djmin, 1995:9-10).

Menurut Hadi Prayitno (1987:8), masalah pokok dalam pembangunan pedesaan terletak pada 3 hal yaitu :

1. Potensi sumber-sumber alam belum dikelola secara optimal
2. Mutu tenaga kerja rendah
3. Sikap manusia dan fungsi kelembagaan di pedesaan belum sejalan dengan gerak pembangunan.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis, dan berkelanjutan bahwa pembangunan akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Terutama yang menyangkut potensi masyarakat dan daya dukung alamnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan merupakan suatu kebijakan pemerintah tentang bantuan dana bergulir, bantuan penyediaan sarana dan prasarana yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat serta aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif

dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya ekonomi pedesaan. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan struktural maupun kultural dapat dilakukan secara simultan.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.(Widjaja, 2003:169)

Menurut Suharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/kelompok yang diberdayakan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang

dimiliki masyarakat. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kartasmita dalam Sufian (2006 : 5) berargumentasi bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Untuk meningkatkan sumber daya pedesaan dapat dilakukan empat pendekatan, diantaranya :

1. Pendekatan penyuluhan, berusaha merubah pertanian subsistensi menjadi suatu masyarakat yang dinamik dan meningkatkan suatu taraf hidup keluarga dan masyarakat.
2. Pendekatan pelatihan/pendidikan, pengajaran yang sistematis serta mendalam untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dasar tertentu.
3. Pendekatan swadaya terpadu, merubah watak, sikap penduduk terhadap pembaharuan dan hasrat mereka terhadap perbaikan nasib.
4. Pendekatan pembangunan terpadu, sifatnya beraneka ragam dan tegas dalam memilih metode pendidikannya. Suatu pandangan yang luas mengenai proses pembangunan dan cara mengkoordinasi dalam rangka satu sistem pengelolaan tunggal segala komponen penting.

Langkah-langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Zulkarnain, 2001:7), diantaranya :

1. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani terhadap potensi dan pengembangan usahanya.
2. Melakukan program pembinaan yang kontiniu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program-program pendampingan.
3. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antara instansi yang terlibat dalam proses pembinaan baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar dan penerapan teknologi.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek, sehingga diharapkan dapat mampu menciptakan

masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

Menurut Zubaedi (2007:18) mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan efektif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Lebih lanjut Zubaedi menjelaskan pengembangan masyarakat sering kali di implementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan:

“Pertama, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab.

Program yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat, terlaksana apabila masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut. Sebagaimana dikatakan Wahyudi Sumpeno (dalam Mudiyono Dkk, 2005:115-116) memberikan penegasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat agar pembangunan itu lebih memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat dan lebih terarah pada tujuan pengembangan masyarakat itu sendiri, yang ia ungkapkan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumberdaya manusia tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun dari pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumberdaya pendukung lebih banyak dimiliki individu, kelompok, atau organisasi masyarakat.
2. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program dengan baik termasuk dalam tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan bersama.

3. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja bersama dalam program-program pembangunan manakala mereka ikut bertanggung jawab di dalamnya.
4. Dalam kehidupan demokratis secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan dan harapan yang ingin dicapainya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping itu masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Dalam praktiknya, setiap pekerjaan membutuhkan organisasi yaitu sekumpulan orang-orang, pekerjaan untuk menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain dan beberapa tahapan-tahapan tersebut bisa berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian.

Pendapat yang menyatakan bahwa tugas administrator negara semata-mata menjalankan kebijakan publik ternyata tidak relevan lagi. Karena dengan semakin besar tanggung jawab administratif dari administrator negara, maka selagi ia memainkan peran instrumental (melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus merumuskan kebijakan tersebut, maka ia juga akan memainkan peran politik). Indikator yang menunjukkan peran ini juga cukup banyak dengan kata lain administrasi negara hakekatnya juga proses politik.

Menurut Dye (dalam Islamy 2004: 18), kebijaksanaan Negara adalah sebagai apapun yang diiluh oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifitas) dan kebijaksanaan Negara itu harus meliputi semua tindakan

pemerintah bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Secara sederhana bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota (Nugroho, 2004:92).

Dunn (2003:49), mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah tindakan dalam rangka penerapan kebijakan yang dilakukan, adapun indikasinya adalah:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan

c. Pengawasan

d. Penilaian

2.3 Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang terpenting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok kerja.

Titik tolak pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam usaha atau dalam organisasi bersangkutan. Oleh karena petugas-petugas dalam perusahaan, kegiatan-kegiatannya atau tugas-tugasnya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip yang dapat merefleksikan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada pola organisasi bersangkutan.

Setiap kebijakan tentu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tanpa ada pengawasan dan penilaian (evaluasi) yang serius. Dimana tujuannya dari pengawasan dan penilaian (evaluasi) tersebut untuk kesempurnaan pencapaian sasaran tujuan dari kebijakan tersebut. Maka dalam hal ini Terry (dalam Mukijat, 2000:55), mengatakan pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, menilainya dan menerapkan tindakan-tindakan perbaikan apabila diperlukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan rencana.

The Liang Gie (dalam mukijat 2000: 57), juga mengatakan pengawasan adalah kegiatan mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, pemerintah petunjuk atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Pengawasan dapat ditinjau dari 3 (tiga) segi, yaitu :

1. Pengawasan dari segi waktu
Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Alat yang dipakai untuk pengawasan ialah perencanaan dan budget, sedangkan pengawasan secara represif menggunakan alat budget dan laporan.
2. Pengawasan dari segi obyek
Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan, pengawasan dari segi obyek merupakan pengawasan administratif dan pengawasan operatif. Contoh pengawasan administratif adalah pengawasan anggaran, inspeksi, pengawasan order dan pengawasan kebijaksanaan
3. Pengawasan dari segi subyek
Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern.(Yayat M. Herujito, 2004: 243)

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengawasi langsung di tempat (*personal inspections*),
2. Melalui laporan lisan (*oral report*),
3. Melalui tulisan (*written report*),
4. Melalui penjagaan khusus (*control by exeption*). (*Ibid*:243)

Menurut Yayat M.Herujito (2004:243) adapun tolak ukur yang dipakai dalam pengawasan ialah sebagai berikut :

1. Tolak ukur dengan standard fisik (*physical standard*)
Tolak ukur dengan standard fisik memperhatikan tiga hal :
 - 1) Kualitas hasil produksi,
 - 2) Kuantitas hasil produksi,
 - 3) Waktu penyelesaian.
2. Tolak ukur dengan standard non fisik, seperti hal-hal yang dapat dirasakan, tetapi tidak dapat dilihat dan dipakai (*intangible standard*).

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawsan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standard atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang banar-benar dapat efektif dilaksanakan.

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Berarti inti fungsi ini menyoroti apa yang sedang terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan operasional sedang berlangsung. Jika penyimpangan ditemukan, tindakan korektif dapat saja diambil sehingga dengan demikian organisasi kembali ke rel yang sebenarnya. Dengan kata lain sorotan perhatian manajemen dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan ialah membandingkan isi rencana dengan kinerja nyata.

2.4 Evaluasi

Siagian (dalam mukijat, 2000:61), mengatakan penilaian (evaluasi) merupakan fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir yang mempunyai arti proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil seharusnya dicapai.

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya. Menurut Anderson (dalam Islamy 2004: 6), evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilai atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya.

Mengikuti William N. Dunn (2003), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) (dalam Riant Nugroho D, 2001:185). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberikan sumbang pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Jones (dalam Islamy, 2004:112), mengatakan penilaian kebijaksanaan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik pengukurannya dan metode analisisnya.

Dapat kita pahami disini, evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik. Menurut Dunn (dalam Nugroho 2003:185), evaluasi dapat dilaksanakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Meskipun berkenaan

dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenan pada kinerja dari kebijakan.

Evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi (Dunn, 2003:167). Keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Dunn (2003:169), menurutnya evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu.

Siagian berpendapat (2005:263), evaluasi merupakan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Maka menurut Dunn (2005: 170), evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu.

Dengan evaluasi ini dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Evaluasi juga dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaan kegiatan dana simpan pinjam kelompok perempuan. Dalam buku Ndraha yang berjudul *Kybernology* (ilmu pemerintahan baru) Evaluasi adalah Proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaiannya dan harapan

suatu kebijakan public. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluasi mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup Rumusan, Implementasi, Lingkungan dan kinerja kebijakan.

Dengan melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditunjukkan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Menurut Suchman (dalam Nugroho, 2003:199) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam mengevaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Berdasarkan petunjuk operasional PNPM Mandiri Perdesaan, *pemantauan* merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara periodik untuk melihat kinerja semua pelaku program dan memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan

sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip dan prosedur program. Maksud pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam program adalah:

1. Membantu para pelaku program (masyarakat, aparat pemerintah, konsultan dll) mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh program.
2. Membantu para pelaku program untuk mengecek apakah suatu kegiatan berhasil diselesaikan sesuai dengan rencana atau tidak seperti:
 - a. Membantu pelaku program untuk mengambil tindakan perbaikan atas masalah yang ditemukan di lapangan.
 - b. Mendokumentasikan berbagai pengalaman yang muncul di dalam pelaksanaan program dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang terjadi tersebut.

Sedangkan tujuan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam program adalah:

1. Memastikan pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perdesaan agar sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur.
2. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.
3. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan membawa manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
5. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
6. Memastikan setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku. Kegiatan ini harus dianggap sebagai alat yang penting untuk memperbaiki program. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi sebagai berikut: obyektifitas dan profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, terintegrasi, berbasis indikator kerja. (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2007:3).

1. Obyektif dan profesional
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin. Informasi harus diuji silang dengan sumber lain untuk menjamin keakurasinya. Informasi yang akurat dan berdasarkan fakta dari sumber terpercaya yang dapat membantu untuk memperbaiki program.
2. Transparan
Pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Hasil pemantauan dan evaluasi harus diketahui oleh banyak orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.
3. Partisipatif
Semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan harus bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah

yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program.

4. Akuntabel

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dapat dipertanggung jawabkan secara internal maupun eksternal.

5. Berorientasi Solusi

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pembahasan hasil-hasilnya diorientasikan untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi dan karena itu dapat dimanfaatkan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja.

6. Terintegrasi

Kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan konsultan maupun fasilitator harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Selain itu, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi oleh konsultan maupun fasilitator juga harus terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Konsultan maupun fasilitator tidak mungkin melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan di lapangan setiap saat sehingga peran masyarakat untuk memantau dan mengawasi program menjadi penting. Tim pemantauan/pengawasan dari masyarakat adalah mitra dan kepanjangan tangan konsultan dan fasilitator dalam melakukan monitoring dan evaluasi program di tingkat desa maupun kecamatan.

7. Berbasis indikator kinerja

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan berdasarkan criteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program.

PNPM-Perdesaan bekerja di wilayah beresiko tinggi. Dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan semestinya, program menerapkan sistem pengawasan berlapis yaitu pemantauan partisipasi oleh masyarakat, pemantauan oleh pemerintah, pemantauan oleh konsultan, mekanisme penanganan pengaduan dan masalah, pemantauan independent oleh LSM / jurnalis, kajian keuangan dan audit.

1. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat

Pemantauan paling efektif adalah pemantauan oleh penerima manfaat program, yakni masyarakat. Program mengajak masyarakat terlibat langsung, memilih sendiri badan (komite) pemantau untuk mengawasi

pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek dilokasinya. Anggota dari komite pemantau juga turut mengecek harga, penawaran, pasokan barang, manfaat kegiatan bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan kegiatan. Setiap Tim pelaksana kegiatan (TPK) di masing-masing desa berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana program. TPK melaporkan minimal dua kali kepada masyarakat dalam forum ”musyawarah pertanggung jawaban”. Program mewajibkan semua informasi terkait proyek harus diumumkan pada papan informasi di setiap desa.

2. pemantauan oleh masyarakat

Dana program merupakan dana publik, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, memastikan dana tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semua jajaran pemerintah (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati, Camat, PJOK) memiliki tanggung jawab sama untuk memantau pelaksanaan kegiatan program di wilayah masing-masing.

3. Pemantauan oleh konsultan

Pemantauan kegiatan program tentunya merupakan tanggung jawab bersama konsultan dan fasilitator di berbagai jenjang. Para konsultan dan fasilitator melakukan kunjungan rutin kelokasi kegiatan untuk memberikan pendampingan teknis dan supervise.

4. Mekanisme penanganan pengaduan dan masalah

Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator program, staf pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/langsung ke pusat PNPM-Perdesaan membentuk unit penanganan pengaduan dan masalah ditingkat pusat dan regional untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat.

5. Pemantauan *independent* oleh LSM/jurnalis

PNPM-Perdesaan bekerjasama dengan beberapa LSM yang cakap di setiap provinsi untuk melakukan pemantauan rutin secara independen. Program juga terus mengupayakan mengundang jurnalis untuk memantau, memberitakan dan menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka dilapangan.

6. Kajian keuangan dan audit

Sejumlah pihak secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit program, yakni:

1. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit memiliki pemerintah, setiap tahun BPKP mengaudit 5% sample kegiatan program.
2. Unit pelatihan dan supervisi keuangan program memiliki staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan / *on-the-job training* bagi unit pengelola keuangan (UPK), TPK dan kelompok pemanfaatan pinjaman ekonomi.
3. Misi supervisi bank dunia. Bank dunia bersama-sama konsultan manajemen nasional PNPM-Perdesaan dan pemerintah melakukan

misi supervisi persemester. Misi tersebut membantu identifikasi isu-isu manajemen dan mengevaluasi kemajuan program, mulai dari tingkat pusat hingga desa.

4. Audit silang oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa/kecamatan.

Para pelaku program di lapangan juga kerap melakukan audit silang antar desa atau antar kecamatan. Baik antar desa dalam satu kecamatan maupun kecamatan lain atau antar kecamatan disatu kabupaten atau kabupaten berbeda. Audit meliputi kemajuan dan kualitas kegiatan pengelolaan keuangan dan pembukuan. Audit silang ini efektif dalam menjaga konsisten pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling bertukar pengalaman atau pelaku program.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut: “diduga pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir ada yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007.

2.6 Variabel Penelitian

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2003:38).

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah “ Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana. Dan yang menjadi indikator dalam variabel ini adalah evaluasi dan pembangunan.

Tolak Ukur Pembangunan (Arif Budiman, 2000:4) yang menjadi sub indikatornya antara lain :

1. Kekayaan Rata-rata
2. Pemerataan
3. Kualitas Kehidupan
4. Keseimbangan / kerusakan lingkungan
5. Kestinambungan

Sedangkan, Evaluasi yang menjadi sub indikatornya (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2007:3) antara lain :

1. Obyektif dan professional
2. Transparan
3. Partisipatif
4. Akuntabel
5. Berorientasi Solusi
6. Terintegrasi

7. Berbasis indikator kinerja

2.7 Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penafsiran konsep-konsep yang terdapat dalam tulisan ini, maka penulis membentuk konsep operasionalnya sebagai berikut:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program yang dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan titik tekan pada upaya pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat penerima bantuan diberikan kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan musyawarah, dimana prioritas utama PNPM Mandiri Perdesaan adalah masyarakat miskin / kurang mampu sehingga dengan dana PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang mana tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan membantu pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dan partisipatif dengan memperkuat kemampuan kecamatan dan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan.
2. Secara umum tujuan pembangunan prasarana dan sarana adalah pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas

masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa, serta peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Secara khusus tujuannya adalah untuk membangun prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkan, diperuntukkan :

- 1) Menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi rumah tangga miskin.
 - 2) Meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana.
 - 4) Meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana Pemeliharaan Prasarana, dalam pengelolaan kegiatan.
 - 5) Meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan.
3. Dalam Sarana dan Prasarana dalam hal ini, infrastuktur yang dimaksud adalah dalam penelitian ini khusus pada sarana dan prasarana segala kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di desa Rambah Hilir. Yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut.
4. Prasarana untuk mendukung pemerataan pembangunan fisik (*infrastruktur*) di masyarakat dalam penelitian ini adalah tujuannya

untuk kelancaran aktivitas masyarakat baik itu dalam meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan.

5. Pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem atau sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
6. pembangunan masyarakat desa yaitu suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.
7. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
9. Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, menilainya dan menerapkan tindakan-tindakan perbaikan apabila diperlukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan rencana.
10. Evaluasi adalah suatu proses berdasarkan pada disiplin ketat dan tahapan waktu, untuk mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan.

11. Transparan maksudnya seluruh operasional kegiatan sarana dan prasarana harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas.
12. Partisipasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana.

2.8 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, studi kasus terhadap program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

KONSEP	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR
<p>1. Menurut Arif Budiman (2000:4), pembangunan merupakan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah bangsa atau negara dan menjadi semakin kompleks, tidak hanya terbatas pada masalah pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga meliputi masalah sosial dan lingkungan.</p>	<p>Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan</p>	<p>1.Tolak ukur Pembangunan</p>	<p>a. Kekayaan rata-rata. b. Pemerataan c.Kualitas Kehidupan d. Keseimbangan e. kesinambungan</p>
<p>2. Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2007:3) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku. Kegiatan ini harus dianggap sebagai alat yang penting untuk memperbaiki program.</p>		<p>2. Prinsip-prinsip Evaluasi</p>	<p>a. Obyektif dan professional b. Transparan c. Partisipatif d. Akuntabel e.Berorientasi Solusi f. Terintegrasi g.Berbasis indikator kinerja</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Penelitian ini dapat dinyatakan sebagai evaluasi, tetapi dalam hal lain juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena.(Sugiyono, 2003 : 9)

Evaluasi formatif digunakan untuk mendapatkan *feedback* dari suatu aktivitas dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program atau produk yang berupa barang dan jasa.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun pertimbangan penulis memilih Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir sebagai objek penelitian yaitu berdasarkan fenomena yang ada, karena di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir belum terlaksananya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri secara maksimal, menyeluruh dan merata bagi kepentingan masyarakat. Maka untuk itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut

bagaimana pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dalam program pembangunan sarana dan prasarana. Waktu penelitian ini dimulai semenjak bulan Oktober tanggal 3 sampai dengan 31 Desember 2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui Quisioner, Interview, maupun Observasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun data yang diperoleh dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tentunya yang berkaitan Pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana, yang diantaranya:

1. Jawaban responden terhadap kuesioner
2. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara
3. Dan sebagainya.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah di publikasikan atau diolah oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku-buku, literature, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan jenis dan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun data, yang diperoleh meliputi :

1. Letak Geografis Kecamatan Rambah Hilir
2. Jumlah Aparat Pemerintah Menurut Desa Tahun 2011
3. Sejarah, Visi dan Misi desa Rambah Hilir
4. Kelembagaan Desa Rambah Hilir
5. Monografi Desa Rambah Hilir
6. Penjelasan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khususnya dalam program pembangunan sarana dan prasarana
7. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Kecamatan
8. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Desa

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005 :90).

Sedangkan sampel menurut Sugiono (2005:91) adalah Bagian Dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi penelitian ini adalah pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kecamatan dan tingkat Desa, dengan jumlah anggotanya 58 orang. Karena terbatasnya jumlah populasi maka semua populasi dijadikan sebagai sampel, dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu orang-orang yang mengetahui tentang objek penelitian, yaitu mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Tabel III.1 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Desa

No	Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan	Anggota
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5 Orang
3.	Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK)	3 Orang
4.	Tim Penulis Usulan (TPU)	3 Orang
5.	Tim Pemantau	18 Orang
6.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD)	2 Orang
Jumlah		32 Orang

Sumber : Kantor Kec. Rambah Hilir, 2011

Dari Tabel III.1 diatas, terlihat bahwa pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tingkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (KPMD), anggotanya sebanyak 32 Orang.

Tabel III.2 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Kecamatan

No	Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan	Anggota
1.	Camat	1 Orang
2.	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)	1 Orang
3.	Tim Verifikasi (TV)	5 Orang
4.	Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	3 Orang
5.	Badan Pengawas UPK (BP-UPK)	3 Orang
6.	Fasilitator Kecamatan (FK)	2 Orang
7.	Pendamping Lokal (PL)	1 Orang
8.	Tim Pengamat	6 Orang
9.	Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)	3 Orang
10.	Setrawan Kecamatan	1 Orang
Jumlah		26 Orang

Sumber : Kantor Kec. Rambah Hilir, 2011

Dari Tabel III.2 diatas, terlihat bahwa pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kecamatan yang terdiri dari Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal (PL), Fasilitator Kecamatan (FK), Setrawan Kecamatan, Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) anggotanya sebanyak 26 orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3.5.2 Kuisisioner (Angket)

Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden mengenai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, khususnya pada program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3.5.3 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum begitu sempurna terjaring dengan teknik kuesioner.

3.6 Analisis Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai evaluasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian data dituangkan kedalam bentuk Tabel – tabel dengan angka dan prosentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa. Adapun menurut Arikunto (2006: 79), dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan prosentase dengan rumus sebagai berikut:

$P = \frac{F}{N} \times 100\%$	<p>Dimana:</p> <p>P = Prosentase</p> <p>F = Frekuensi</p> <p>N = Total Jumlah</p>
--------------------------------	---

Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokkan menjadi 4 kriteria penilaian yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, hal itu mengacu pada pendapat Arikunto (2006:77). Adapun kriteria prosentase tersebut sebagai berikut:

Prosentase antara 76% - 100% dikatakan “Baik”

Prosentase antara 56% - 75% dikatakan “Cukup baik”

Prosentase antara 40% - 55% dikatakan “Kurang baik”

Prosentase kurang dari 40% dikatakan “Tidak baik”

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. 1. Gambaran Umum Kecamatan Rambah Hilir

Kecamatan Rambah Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah menurut pengukuran Kantor Camat adalah kurang lebih 295,14 Km² atau 29.514 Ha, mempunyai 13 Desa dengan pusat pemerintah berada di Desa Rambah Hilir.

Pada tahun 2010 Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Mempunyai penduduk sebanyak 7869 KK dengan kepadatan penduduk rata-rata 87 jiwa / Km².

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Rambah Hilir berbatasan dengan

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rambah dan Rambah Samo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambusai

Tabel IV.1. Jumlah Aparat Pemerintah Menurut Desa Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Pamong Desa	RW	RT
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rambah Hilir	5	7	17
2.	Rambah Hilir Tengah	5	10	20
3.	Rambah Timur	5	10	21
4.	Pasir Utama	3	6	32
5.	Pasir Jaya	4	8	22
6.	Rambah Muda	3	6	28
7.	Sei. Sitolang	3	6	21
8	LB. Kerapat	3	6	12
.9.	Rambah	10	20	39
10.	Serombou Indah	6	8	18
11.	Sei. Dua Indah	3	6	12
12.	Muara Musu	5	9	23
13.	Sejati	6	6	9
Jumlah 2011		61	108	274

Sumber : Kantor Kec. Rambah Hilir, 2011

Dari Tabel IV.1 di atas, terlihat bahwa Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari 13 (Tiga Belas) Desa, dengan jumlah 61 Pamong Desa, 108 Rukun Warga (RW) dan 274 Rukun Tetangga (RT).

4.2. Gambaran Umum Desa Rambah Hilir

4.2.1 Sejarah Desa Rambah Hilir

Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau berdiri sejak masih Kabupaten Kampar, yang mana setelah terjadi pemecahan dan pemekaran yang telah dimekarkan dari Desa Rambah Hilir yaitu 5 Desa, yaitu (Desa Rambah, Desa Serombou Indah, Desa Sei Dua Indah, Desa Rambah Hilir Timur dan Desa Sejati) sedangkan desa yang akan dimekarkan dan sekarang semua usulan telah disampaikan ke Kabupaten Rokan Hulu yaitu Desa Rambah Hilir Barat (masa usulan).

Desa Rambah Hilir dimata semua orang lebih mengenalnya dengan sebutan Muara Rumbai, yang mana menurut cerita orang dahulu, di Desa Rambah Hilir terdapat suatu sungai yaitu Sungai Rokan Kanan atau lebih dikenal dengan sebutan Sungai Batang Lubuh yang mana diantara Sungai Rokan Kanan tersebut terdapat suatu Muara yang mana Muara itu banyak terdapat Rumbai (bahan baku untuk pembuatan tikar) sehingga Muara tersebut dinamakan Muara Rumbai, yang sampai saat ini masih terkenal kemana-mana.

Desa Rambah Hilir mempunyai kecamatan yaitu kecamatan Rambah Hilir, yang mana Kecamatan Rambah Hilir dulunya masih tergabung dengan Kecamatan Rambah, tetapi setelah dimekarkan Kabupaten Rokan Hulu dari Kabupaten Kampar pada tahun 1999, maka kecamatan Rambah dimekarkan juga menjadi 3 Kecamatan yaitu (Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Bangun Purba).

4.2.2 Visi dan Misi Desa Rambah Hilir

Adapun visi Desa Rambah Hilir adalah terwujudnya masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera dengan beriman kepada Allah SWT yang didukung oleh masyarakat yang sehat, mandiri dan berilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai kesadaran gotong royong. Sedangkan Misi Desa Rambah Hilir adalah sebagai desa yang terbaik, khususnya di Kecamatan Rambah Hilir dan Umumnya di Kabupaten Rokan Hulu dengan berlandaskan dari pada:

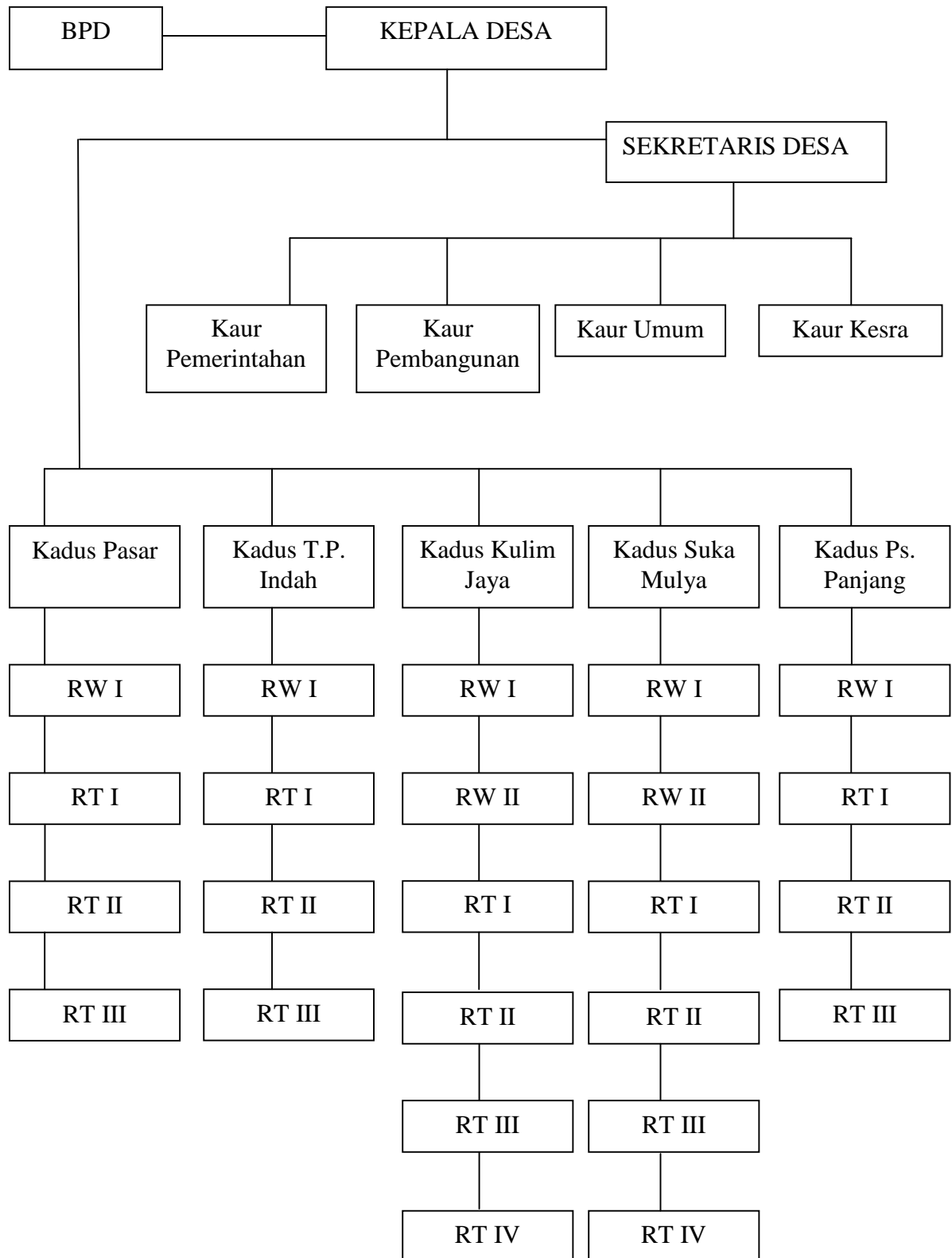
1. Pengalaman Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Peningkatan pengalaman ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam kehidupan dan memantapkan persaudaraan dengan saling menghormati antar sesama.
3. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman bermasyarakat.
4. Perwujudan aparatur Pemerintahan desa yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif dan transparan.

4.2.3 Kelembagaan Desa Rambah Hilir

Didalam pemerintahan desa Rambah Hilir dipimpin oleh kepala desa dan di Bantu oleh perangkat desa dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adapun jumlah kepengurusannya kelembagaan desa yang ada yaitu :

1. Jumlah pengurusan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) wakil ketua, 3 (tiga) orang anggota.
2. Jumlah pengurus LPM terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan 8 (delapan) orang anggota.
3. Jumlah Tim Penggerak Pkk 1 (satu) orang.
4. Jumlah kader PKK 16 orang.

Adapun struktur pemerintah desa Rambah Hilir sebagai berikut :



Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur organisasi pemerintah Desa, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur organisasi pemerintahan Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa :

- a. Kedudukan sebagai alat pemerintah dan unit pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Menumbuhkan kembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretaris Desa :

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf di bidang tata usaha Kepala Desa dan memimpin sekretaris Desa.
- b. Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberi pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

- c. Fungsinya melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala Desa dalam hal bila Kepala Desa berhalangan.
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Urusan :
- a. Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing-masing.
 - b. Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
 - c. Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data/informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing.
4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Dusun :
- a. Berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
 - b. Bertugas melaksanakan pemerintahan Desa dibawah kepemimpinan Kepala Desa wilayah kerjanya.
 - c. Berfungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa.

4.2.4 Monografi Desa Rambah Hilir

4.2.4.1 Kependudukan

Secara Administrasi Desa Rambah Hilir terdiri dari 5 Dusun, 7 RW, 17 RT yang menempati luas areal 1.183 Ha. Penduduk Desa Rambah Hilir mayoritas berasal dari suku melayu 95% dan 100% beragama islam dan pekerjaannya 95% petani selebihnya PNS dan swasta 5%.

4.2.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2010

Penduduk Desa Rambah Hilir dilihat dari Gender tahun 2010 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IV.2 di bawah ini:

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Rambah Hilir Berdasarkan Gender Tahun 2010

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2010			Jumlah
	1	2	3	
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Kepala Keluarga	
1	1.075 Jiwa	1.082 Jiwa	675 KK	2.157 Jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa Rambah Hilir, 2010.

Dari Tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana jumlah laki-laki 1.075 jiwa sedangkan jumlah perempuan hanya 1.082 jiwa saja. Dan jumlah Kepala Keluarga ada 675 KK.

4.2.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di Desa Rambah Hilir, maka dapat dibagi kepada 13 tingkatan, dapat dilihat pada Tabel IV.3 di bawah ini:

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Desa Rambah Hilir

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur													Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60>	
162	146	230	350	332	345	139	150	59	52	60	63	69	2.157

Sumber : Kantor Kepala Desa Rambah Hilir, 2010.

Dari Tabel IV.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Rambah Hilir adalah yang berumur 15 sampai 19 tahun yaitu 350 orang. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah yang usia 45 sampai 49 yaitu 52 orang.

4.2.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu maka dapat dibagi kepada 10 (Sepuluh) tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.4 di bawah ini:

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan										Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Buta Huruf	Paud	TK	SD	SLTP	SLTA	D I	DII	D III	SI	
129	69	38	806	301	442	7	21	9	29	2.157

Sumber : *Kantor Kepala Desa Rambah Hilir, 2010.*

Dari Tabel IV.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Rambah Hilir dilihat dari tingkat pendidikannya adalah tamatan SD yaitu sebanyak 806 orang. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah tamatan D I yaitu hanya 7 orang.

4.3 Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang berkembang di Indonesia telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Harapan dari sebuah program pemberdayaan adalah keberhasilan yang dirasakan bagi masyarakat sasaran tanpa memberikan gejolak sosial yang berarti. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selalu mempunyai dua sisi pengaruh, yakni terwujudnya tatanan ideal program atau masyarakat yang terstruktur dan kenyataan yang berbeda dari tujuan program atau konflik-konflik sebagai ciri dari masyarakat yang dinamis.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat menggambarkan tentang bagaimana sistem sosial dalam masyarakat tersebut akan dibangun. Dari hal tersebut jelas membuktikan, bahwa kesertaan secara individual pengurus desa terlibat secara langsung dalam kepengurusan kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai usaha untuk menciptakan sistem sosial baru yang fungsional melalui kelembagaan baru PNPM Mandiri Perdesaan. Ada semacam anggapan, kelembagaan baru ini akan lebih fungsional apabila dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman dalam kepengurusan di kelembagaan formal. PNPM Mandiri Perdesaan memusatkan kegiatan pada masyarakat paling miskin di perdesaan di tanah air. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program

pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini. Terbesar karena cakupan wilayah, serapan dana, kegiatan yang dihasilkan dan jumlah pemanfaatnya.

Program berupaya meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antardesa melalui berbagai jenis pelatihan. Program menyediakan dana stimulan untuk pengadaan sarana dan prasarana dasar perdesaan yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat miskin, paling prioritas dan mendesak; serta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada upaya pemeliharannya. Kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana, pinjaman modal usaha dan simpan pinjam, atau kegiatan sosial dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan memberikan dana bantuan langsung (BLM) kepada masyarakat dan bantuan teknis berupa konsultan atau fasilitator.

Ada beberapa ketentuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, diantaranya open menu, maksudnya PNPM Mandiri Perdesaan sangat terbuka menerima usulan kegiatan masyarakat untuk didanai. Namun hanya usulan yang menguntungkan, melibatkan banyak masyarakat miskin dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, yang mendapat prioritas utama pendanaan. PNPM Mandiri Perdesaan menghindari jenis kegiatan yang dilarang (negative list).

Ketentuan dasar lainnya adalah proses kompetisi dalam penentuan usulan kegiatan yang akan didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Proses ini harus didasari prinsip-prinsip keterlibatan orang miskin dan keberpihakan pada kaum perempuan. Aspek-aspek seperti tingkat swadaya masyarakat, pelestarian kegiatan, dan penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran atas ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, juga menjadi landasan penting.

Adapun pengelompokan peran pelaku PNPM Mandiri Pedesaan sebagai berikut:

1. Pelaku Di Desa

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi:

1) Kepala Desa (Kades)

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD atau sebutan lainnya)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa.

3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil MAD keanggotaan TPK dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

4) Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes.

Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada.

5) Tim Pemantau

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa.

6) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)

KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.

Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan.

Kader dengan kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu Fasilitator Kecamatan dalam tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.

2. PELAKU DI KECAMATAN

1) Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

2) Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

3) Tim Verifikasi (TV)

TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

4) Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. UPK mendapatkan penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

5) Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui

musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota. BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

6) Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran fasilitator kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.

7) Pendamping Lokal (PL)

Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Di setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.

8) Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. Serta memberikan masukan dan saran agar MAD dapat berlangsung secara partisipatif.

9) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana-prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program/ proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa .

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang *pengelolaan dana bergulir*, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.

10) Setrawan Kecamatan

Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah kecamatan dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Dalam hal tertentu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan di kecamatan sebagai setrawan kecamatan. Dalam kaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan, setrawan melibatkan diri dalam proses kegiatan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.

4.3.1 Identitas Responden

Sebelum hasil penelitian ini disampaikan, terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan identitas responden. Adapun responden disini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian yang terlibat langsung dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana (fisik). Untuk jelasnya, akan diuraikan sebagai berikut:

Responden penelitian ini terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah responden ditinjau dari jenis kelaminnya, dapat dilihat pada Tabel IV.5 dibawah ini:

Tabel. IV.5 : Jenis Kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-Laki	41	70,69%
2	Perempuan	17	29,31%
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Dari Tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan yakni 41 orang atau 70,69% untuk yang pertama dan 17 orang atau 29,31% untuk yang kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir belum cukup memadai, karena belum hampir setengah dari anggotanya merupakan kaum perempuan.

Responden diatas, juga memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel. IV.6 : Tingkat Pendidikan Responden

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	SMP	0	-
2	SMA	32	55,18%
3	D3	17	29,31%
4	S1	9	15,51%
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Menurut Tabel IV.6 diatas maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden bisa dikatakan tinggi karena sebagian besar responden adalah tamatan SMA (55,18%), tamatan D3 (29,31%) dan Perguruan Tinggi (15,51%), sedangkan yang mempunyai pendidikan tamatan Sekolah Menengah Pertama tidak ada sama sekali.

Sama halnya dengan tingkat pendidikan responden, perbedaan juga terjadi pada masa lamanya responden menjadi anggota PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Rambah Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.7 di bawah ini:

Tabel. IV.7 : Masa kerja responden menjadi anggota PNPM Mandiri Perdesaan

NO	Kelompok Masa	Jumlah	Prosentase (%)
1	1 tahun	15	25,87%
2	2 tahun	15	25,87%
3	3 tahun	11	18,96%
4	4 tahun	7	12,06%
5	5 tahun keatas	10	17,24%
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Dari Tabel IV.7 diatas dapat dilihat bahwa masa responden menjadi anggota PNPM Mandiri Perdesaan sudah cukup lama, dimana hanya ada beberapa orang saja responden yakni 15 orang atau 25,87% yang menjadi anggota pada kelompok masa pertama, sedangkan yang lainnya sudah menjadi anggota lebih dari 1 (satu) tahun ke atas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5. 1. Hasil Penelitian

5.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Evaluasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan studi kasus terhadap program pembangunan sarana dan prasarana (fisik) di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Tolak Ukur Pembangunan
2. Prinsip Evaluasi

Berdasarkan hal demikian, dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan satu-persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan responden terhadap pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana (fisik) yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, baik itu dengan menjawab kuesioner yang telah disebarakan maupun jawaban-jawaban responden sewaktu wawancara.

5.1.1.1 Tolak Ukur Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Cara pandang pembangunan ada 2 macam yaitu : Dari fisiknya (materi), dan dari non fisik misalnya: sumber daya manusia, sumber

daya alam, keterampilan, dan lain-lain. Sedangkan yang menjadi tolak ukur bahwa pembangunan disuatu daerah berhasil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kekayaan Rata-rata.
2. Pemerataan
3. Kualitas Kehidupan
4. Keseimbangan
5. Kestinambungan

Untuk melihat tanggapan responden terhadap tolak ukur bahwa pembangunan disuatu daerah bisa dikatakan berhasil yang pertama yaitu kekayaan rata-rata, dimana pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Rambah Hilir meningkat dapat dilihat pada Tabel V.1 berikut:

Tabel V.1 : Tanggapan Responden Tentang Kekayaan Rata-rata.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	42	72,41%
3	Cukup Sesuai	16	27,59%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 42 orang atau 72,41% sudah sesuai bahwa setiap pertumbuhan perekonomian masyarakat meningkat. Walaupun mayoritas responden sesuai dengan ketentuan yang demikian, masih terdapat 16 orang atau 27,59% responden yang menilai cukup sesuai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip kekayaan rata-rata sudah Sesuai dengan ketentuannya, yaitu bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Rambah Hilir. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan responden yaitu 42 orang atau 72,41% menilai sudah sesuai.

Hal ini terjadi karena menurut fasilitator teknik kecamatan Desa Rambah Hilir, Bapak Rusmadi mengatakan “Pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang betul-betul bermanfaat, sehingga pertumbuhan perekonomian masyarakat bisa meningkat”.

Dari pernyataan tersebut memberikan arti bahwa kegiatan yang dibangun terutama kegiatan fisik menjadikan masyarakat puas dan benar-benar bermanfaat. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tak lepas dari perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritasnya.

Setiap masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan kegiatan pembangunan, dimana pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan permohonan tersebut terlebih dahulu diserahkan ke Tim Penulis Usulan (TPU) dan akan dibahas melalui forum Musyawarah Kelurahan untuk menentukan kegiatan tersebut diterima atau tidak. Bila sudah ditetapkan kegiatan diterima, maka kegiatan pembangunan yang diajukan tersebut akan menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya.

Dilihat dari Tabel V.1 diatas namun masih ada responden yang menilai cukup sesuai yaitu 16 orang atau 27,59% hal itu terjadi karena menurut Sekretaris UPK Rambah Hilir Ibu Sarinah, beliau mengatakan:

“Bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif”.

Pembangunan pada prinsip harus dirasakan oleh semua pihak, oleh karena itu pembangunan harus merata. Apakah kegiatan pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir merata atau tidak, dapat kita lihat dalam Tabel V.2 berikut ini:

Tabel V.2 : Tanggapan Responden Terhadap Prinsip Pemerataan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	4	6,90%
2	Sesuai	46	79,31%
3	Cukup Sesuai	8	13,79%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 46 orang atau 79,31% sudah sesuai bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bahkan ada responden yaitu 4 orang atau 6,90% menilai sangat sesuai. Walaupun mayoritas responden sesuai dengan ketentuan yang demikian, masih terdapat 8 orang atau 13,79% responden yang menilai cukup sesuai.

Dari uraian Tabel V.2 diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang diusulkan merupakan pembangunan yang nantinya hasil dari pembangunan tersebut bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga prinsip dari pemerataan tersebut bisa terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan responden (46 orang atau 79,31%) sudah sesuai terhadap ketentuan yang demikian.

Menurut PJOK Desa Rambah Hilir yaitu Bapak Azwar Saleh, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, beliau berkata:

”Setiap usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat terlebih dahulu ditinjau oleh tim verifikasi, lalu diserahkan ke TPU Desa Rambah Hilir kemudian usulan itu akan dibahas dalam musyawarah desa. Setiap desa berhak mengusulkan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya. Di dalam musyawarah ini semua kegiatan pembangunan yang diajukan oleh setiap desa diadakan perangkingan, untuk memilih kegiatan pembangunan mana yang akan dilaksanakan, yang bertujuan supaya kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya merupakan pembangunan yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan supaya pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat”.

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Azwar Saleh selaku PJOK Desa Rambah Hilir di atas, dapat diketahui bahwa, semua usulan kegiatan pembangunan yang masuk ke Lembaga PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Rambah Hilir selalu diputuskan melalui forum musyawarah desa, supaya kegiatan pembangunan yang terpilih adalah benar-benar kegiatan pembangunan yang layak mendapat bantuan dana.

Pembangunan pada prinsip harus memikirkan kualitas kehidupan di suatu daerah, dimana kesejahteraan masyarakat Desa Rambah Hilir meningkat. Apakah kegiatan pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir masyarakat sejahtera atau tidak, dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut ini:

Tabel V.3 : Tanggapan Responden Terhadap Prinsip Kualitas Kehidupan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	42	72,41%
3	Cukup Sesuai	16	27,59%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.3 di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yakni 42 orang atau 72,41% menilai tentang prinsip kualitas kehidupan, dimana kesejahteraan masyarakat meningkat sudah sesuai, namun sebaliknya masih ada yang cukup sesuai yaitu 16 orang atau 27,59%.

Menurut uraian Tabel V.3 di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Rambah Hilir sudah Sesuai, dimana tanggapan kebanyakan responden yaitu 42 orang atau 72,41% menilai sesuai.

Hasil penilaian di atas juga didukung oleh penyampaian FTK Desa Rambah Hilir Bapak Rusmadi, yaitu:

”Setiap pembangunan yang dilaksanakan diharapkan bahwa nantinya hasil dari pembangunan tersebut dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik”.

Pembangunan pada prinsip harus seimbang, dimana setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir memperhatikan lingkungan sekitar. Apakah kegiatan pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir seimbang atau tidak, dapat dilihat pada Tabel V.4 berikut ini:

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Keseimbangan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	38	65,52%
3	Cukup Sesuai	18	31,03%
4	Kurang Sesuai	2	3,45%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.4 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 38 orang atau 65,52% sudah sesuai terhadap prinsip keseimbangan yaitu setiap pembangunan memperhatikan lingkungan sekitar, namun 18 orang atau 31,03% responden menilai masih cukup sesuai, bahkan ada 2 orang atau 3,45% responden menilai kurang sesuai.

Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip keseimbangan, dimana setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir sudah memperhatikan lingkungan sekitar, karena terdapat kebanyakan responden yaitu 38 orang atau 65,52% menilai sudah sesuai.

Sama halnya dengan penyampaian Bapak Rusmadi ketika peneliti bertanya mengenai kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan di Desa Rambah Hilir, beliau mengatakan:

”Bahwa setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, terlebih dahulu harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Agar pembangunan yang akan dilaksanakan nanti tidak sia-sia dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Rambah Hilir harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar.

Dilihat dari Tabel V.4 diatas namun masih ada responden yang menilai cukup sesuai yaitu 18 orang atau 31,03%, bahkan ada 2 orang atau 3,45% responden menilai kurang sesuai. Hal itu terjadi karena menurut Sekretaris UPK Rambah Hilir Ibu Sarinah, beliau mengatakan:

“Pembangunan memang sudah memperhatikan lingkungan sekitar tetapi kurang memperhatikan potensi dari pembangunan tersebut”

Ketentuan pembangunan yang berikutnya adalah prinsip kesinambungan, dimana setiap pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap prinsip kesinambungan yaitu setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir dapat berkelanjutan, dapat dilihat pada Tabel V.5 berikut:

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Kesinambungan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	43	74,14%
3	Cukup Sesuai	15	25,86%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 43 orang atau 74,14% sudah sesuai terhadap prinsip kesinambungan yaitu pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang berkelanjutan, namun walaupun begitu, masih ada juga responden yang merasa cukup sesuai yaitu 15 orang atau 25,86%.

Menurut uraian Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir dapat berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kebanyakan responden 43 orang atau 74,14% sudah sesuai dengan ketentuan yang demikian.

Hasil penilaian di atas juga didukung oleh penyampaian FTK Desa Rambah Hilir Bapak Rusmadi, yaitu:

”Untuk mencapai target suatu pembangunan dimasa yang akan datang, sangat tergantung kepada matangnya suatu perencanaan pembangunan. Karena membangun tanpa perencanaan tidak akan tercapai secara optimal dan malah sebaliknya pembangunan tidak akan terwujud, baik itu waktu pelaksanaannya dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang”.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir, dapat dilihat pada Tabel V.6 berikut:

Tabel V.6 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Yang Dilaksanakan Di Desa Rambah Hilir.

No	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1.	Kekayaan Rata-rata	-	42	16	-	-	58
		-	72,41%	27,59%	-	-	100%
2.	Pemerataan	4	46	8	-	-	58
		6,90%	79,31%	13,79%	-	-	100%
3.	Kualitas Kehidupan	-	42	16	-	-	58
		-	72,41%	27,59%	-	-	100%
4.	Keseimbangan	-	38	18	2	-	58
		-	65,52%	31,03%	3,45%	-	100%
5.	Kekinambungan	-	43	15	-	-	58
		-	74,14%	25,86%	-	-	100%
6.	Total	4	211	73	2	-	290
		1,38%	72,76%	25,17%	0,69%	-	100%
7.	Rata-Rata	0,8	42,2	14,6	0,4	-	58
		1,38%	72,76%	25,17%	0,69%	-	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Keterangan:

- SS : Sangat sesuai
- S : Sesuai
- CS : Cukup Sesuai
- KS : Kurang Sesuai
- BS : Belum Sesuai

Dari Tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 72,76% menilai seluruh ketentuan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir berada pada katagori sesuai, bahkan ada juga beberapa responden yang menyatakan sangat sesuai yaitu 1,38%. Namun masih ada responden yang menilai cukup sesuai yaitu 25,17%, bahkan ada juga responden yang menilai kurang sesuai yaitu 0,69%, sedangkan yang belum sesuai tidak ada sama sekali.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir sudah sesuai dengan tolak ukur bahwa pembangunan disuatu daerah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari Tabel V.6 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 72,76% sudah sesuai terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Rambah Hilir. Namun masih ada yang kurang sesuai yaitu berkenaan dengan prinsip Keseimbangan.

5.1.1.2 Prinsip Evaluasi

Pada dasarnya pelaksanaan evaluasi perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi, dan keinginan yang kuat dari para pelaku. Kegiatan ini harus dianggap sebagai alat yang penting untuk memperbaiki program. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan evaluasi antara lain: obyektifitas dan profesional, transparan,

partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, terintegrasi, dan berbasis indikator kinerja. (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2-3)

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan Prinsip evaluasi dalam program pembangunan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel V.7 di bawah ini:

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Obyektifitas dan Professional.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	5	8,62%
2	Sesuai	36	62,06%
3	Cukup Sesuai	17	29,31%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 36 orang atau 62,06% sesuai terhadap Prinsip Obyektifitas dan Professional, dimana pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin berdasarkan fakta dalam kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir, bahkan ada juga beberapa responden yang menyatakan sangat sesuai yaitu 5 orang atau 8,62%. Namun masih ada responden yang menilai cukup sesuai yaitu 17 orang atau 29,31%.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Prinsip Obyektifitas dan Professional sudah berjalan, dimana pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin berdasarkan fakta dalam kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir. Hal ini dapat

dilihat dari kebanyakan responden yaitu 36 orang atau 62,06% memberi penilaian sesuai.

Hasil penilaian di atas juga didukung oleh penyampaian FTK Desa Rambah Hilir Bapak Rusmadi, yaitu:

“Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin. Informasi yang akurat dan berdasarkan fakta dari sumber terpercaya yang dapat membantu untuk memperbaiki program”.

Evaluasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan prinsip harus diketahui oleh semua pihak, dimana hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir diketahui oleh semua pihak. Apakah kegiatan pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir transparan atau tidak, dapat dilihat pada Tabel V.8 berikut ini:

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Transparan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	2	3,44%
2	Sesuai	24	41,38%
3	Cukup Sesuai	32	55,17%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yaitu 32 orang atau 55,17% cukup sesuai tentang prinsip transparan.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparan cukup sesuai, dimana hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir belum diketahui oleh semua pihak. Karena sesuai dengan teknik

pengukuran bahwa kebanyakan responden (55,17%) menilai prinsip transparan cukup sesuai.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada FTK Rambah Hilir Bapak Rusmadi, beliau mengatakan:

”Bahwasannya masyarakat kurang mengerti terhadap prinsip transparan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dari wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebebasan berbicara, dan bersifat terbuka untuk menerima informasi yang baik ataupun yang buruk, penghargaan maupun kritikan belum tercapai, karena yang seharusnya evaluasi yang dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab dan hasil dari evaluasi terhadap kegiatan pembangunan tersebut harus diketahui oleh banyak orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut, belum bisa terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip partisipatif, dimana semua pelaku program terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Rambah Hilir dapat dilihat pada Tabel V.9 berikut:

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Partisipatif.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	6	10,34%
2	Sesuai	18	31,03%
3	Cukup Sesuai	11	18,97%
4	Kurang Sesuai	23	39,66%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.9 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 23 orang atau 39,66% kurang sesuai dengan prinsip partisipatif dimana semua pelaku program belum terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipatif kurang sesuai, dimana semua pelaku program terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan belum terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (39,66%) menilai prinsip Partisipatif kurang sesuai.

Hasil penilaian di atas juga didukung oleh penyampaian FTK Desa Rambah Hilir Bapak Rusmadi, yaitu:

”Bahwa kita tidak perlu berfikir bagaimana masalah itu bisa muncul dilapangan, tetapi kita harus bisa berfikir untuk melakukan tindakan perbaikan.

Dari wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa belum semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan merasa bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program. Dan apabila terjadi masalah di lapangan para pelaku program menjadi lebih sadar tentang masalah tersebut dan dapat belajar dari masalah itu, dan melakukan langkah perbaikan.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip akuntabel, dimana pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal dapat dilihat pada tabel V.10 berikut:

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Akuntabel.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	8	13,79%
2	Sesuai	46	79,31%
3	Cukup Sesuai	4	6,90%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Dari Tabel V.10 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 46 orang atau 79,31% sesuai dengan prinsip akuntabel, dimana pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal, bahkan ada yang sangat sesuai yakni 8 orang atau 13,79%. Namun sebaliknya masih ada responden yakni 4 orang atau 6,90% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabel, dimana pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir sudah dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (79,31%) menilai prinsip akuntabel sudah sesuai.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Fasilitator Teknik Kecamatan Rambah Hilir Bapak Rusmadi, beliau mengatakan:

“Karena pemantauan, pengawasan dan evaluasi dibuat untuk melihat perkembangan serta capaian program di lapangan, maka kegiatan di lapangan harus sudah dirumuskan dalam bentuk perencanaan yang jelas termasuk target capaian dan tujuannya. Dan dokumen-dokumen perencanaan haruslah lengkap, sehingga pembangunan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal”.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip berorientasi solusi, dimana pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam

pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir dapat dilihat pada Tabel V.11 berikut:

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Berorientasi Solusi.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	50	86,20%
3	Cukup Sesuai	3	5,18%
4	Kurang Sesuai	5	8,62%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 50 orang atau 86,20% sesuai dengan prinsip berorientasi solusi, dimana pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan, namun sebaliknya masih ada responden yakni 5 orang atau 8,62% yang kurang sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip berorientasi solusi, dimana pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (86,20%) menilai prinsip berorientasi solusi sudah sesuai. Walaupun banyak yang menilai sesuai, namun masih ada responden yang menilai kurang sesuai yakni 5 orang atau 8,62% hal ini terjadi karena berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu titik selaku bendahara UPK:

“Prinsip berorientasi solusi ini masih ada yang belum mengerti, sehingga pelaku tersebut belum bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir”.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip terintegrasi, dimana adanya kerjasama antara pelaku program dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa Rambah Hilir, dapat dilihat pada Tabel V.12 berikut:

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Terintegrasi.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	38	65,52%
3	Cukup Sesuai	20	34,48%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Dari Tabel V.12 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 38 orang atau 65,52% sesuai dengan prinsip terintegrasi dimana adanya kerjasama antara pelaku program dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, namun sebaliknya masih ada responden yakni 20 orang atau 34,48% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparan dimana hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir diketahui oleh semua pihak. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (65,52%) menilai prinsip terintegrasi sudah sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip berbasis indikator kinerja, dimana kriteria, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir dapat dilihat pada Tabel V.13 berikut:

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Berbasis Indikator Kinerja.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Sangat Sesuai	7	12,06%
2	Sesuai	37	63,80%
3	Cukup Sesuai	14	24,13%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Berdasarkan Tabel V.13 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 37 orang atau 63,80% sesuai dengan prinsip berbasis indikator kinerja dimana kriteria, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan, bahkan ada yang sangat sesuai yakni 7 orang atau 12,06% namun sebaliknya masih ada responden yakni 14 orang atau 24,13% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip berbasis indikator kinerja dimana kriteria, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (63,80%) menilai prinsip berbasis indikator kinerja sudah sesuai hal ini terjadi karena:

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Fasilitator Teknik Kecamatan Rambah Hilir Bapak Rusmadi, beliau mengatakan:

“Sebelum pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan, terlebih dahulu harus ada perencanaan yang jelas untuk keperluan apa pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan, siapa yang harus dilibatkan, obyek apa yang akan dipantau, indikator penilaian serta manfaat apa yang ingin diperoleh dari kegiatan ini”.

Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan prinsip evaluasi secara keseluruhan di Desa Rambah Hilir dapat dilihat pada Tabel V.14 berikut:

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Prinsip-Prinsip Evaluasi

No	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Prinsip Obyektifitas dan Professional	5	36	17	-	-	58
		8,62%	62,06%	29,31%	-	-	100%
2	Prinsip Transparan	2	24	32	-	-	58
		3,44%	41,38%	55,17%	-	-	100%
3	Prinsip Partisipatif	6	18	11	23	-	58
		10,34%	31,03%	18,97%	39,66%	-	100%
4	Prinsip Akuntabel	8	46	4	-	-	58
		13,79%	79,31%	6,90%	-	-	100%
5	Prinsip Berorientasi Solusi	-	50	3	5	-	58
		-	86,20%	5,18%	8,62%	-	100%
6	Prinsip Terintegrasi	-	38	20	-	-	58
		-	65,52%	34,48%	-	-	100%
7	Prinsip Indikator Kinerja	7	37	14	-	-	58
		12,06%	63,80%	24,13%	-	-	100%
8	Total	28	249	101	28	-	406
		6,90%	61,33%	24,87%	6,90%	-	100%
9	Rata-Rata	4	35,57	14,43	4	-	58
		6,90%	61,33%	24,87%	6,90%	-	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011.*

Keterangan:

- SS : Sangat sesuai
- S : Sesuai
- CS : Cukup Sesuai
- KS : Kurang Sesuai
- BS : Belum Sesuai

Dari Tabel V.14 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 61,33% menilai prinsip evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir sudah sesuai, bahkan ada responden yakni 6,90% yang menilai sangat sesuai. Namun ada responden yaitu 24,87% yang menilai cukup sesuai, bahkan ada responden yaitu 6,90% yang menilai kurang sesuai, sedangkan yang belum sesuai tidak ada sama sekali.

Melalui uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah sudah Sesuai berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu:

1. Pelaksanaan evaluasi sudah dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektifitas dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir.
2. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan di Desa Rambah Hilir dapat mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Sehingga, hasil dari setiap pembangunan diketahui oleh semua pihak.
3. Semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rambah Hilir.
4. Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Rambah Hilir dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal.
5. Setiap pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir.
6. Adanya kerjasama antara pelaku program dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir.
7. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Hilir .

Namun masih ada yang kurang sesuai yaitu berkenaan dengan prinsip partisipatif dan prinsip berorientasi solusi.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Fisik) Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Dari beberapa uraian Tabel sebelumnya mengenai tanggapan responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari:

1. Tanggapan responden terhadap tolak ukur pembangunan yaitu:
 - 1) Kekayaan Rata-Rata,
 - 2) Pemerataan,
 - 3) Kualitas Kehidupan,
 - 4) Keseimbangan,
 - 5) Kestinambungan.
2. Tanggapan responden terhadap prinsip evaluasi yaitu:
 - 1) Obyektif dan Profesional,
 - 2) Transparan,
 - 3) Partisipatif,
 - 4) Akuntabel,

- 5) Berorientasi Solusi,
- 6) Terintegrasi,
- 7) Berbasis Indikator Kinerja,

Secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel rekapitulasi jawaban responden tentang Evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan Program Pembangunan di bawah ini.

Tabel V.15 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Rambah Hilir.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Tolak Ukur Pembangunan	4	211	73	2	-	290
		1,38%	72,76%	25,17%	0,69%	-	100%
2	Prinsip Evaluasi	28	249	101	28	-	406
		6,90%	61,33%	24,87%	6,90%	-	100%
Total		32	460	174	30	-	696
		4,60%	66,09%	25%	4,31%	-	100%
Rata-Rata		2,67	38,33	14,5	2,5	-	58
		4,60%	66,09%	25%	4,31%	-	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2011*

Dari Tabel V.15 di atas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, ternyata kebanyakan responden yaitu 66,09% menilai sudah sesuai, bahkan ada juga responden yaitu 4,60% menilai sangat sesuai, namun masih ada responden yang menilai cukup sesuai yaitu 25%, bahkan ada responden yang menilai kurang sesuai yaitu 4,31%, sedangkan belum sesuai tidak ada sama sekali.

Untuk lebih mudahnya dalam prosentase tersebut, maka digunakan dengan skor yaitu:

Yang menjawab A = 5

Yang menjawab B = 4

Yang menjawab C = 3

Yang menjawab D = 2

Yang menjawab E = 1

Keterangan:

A : Yaitu dengan menjawab Sangat sesuai

B : Yaitu dengan menjawab Sesuai

C : Yaitu dengan menjawab Cukup Sesuai

D : Yaitu dengan menjawab Kurang Sesuai

E : Yaitu dengan menjawab Belum Sesuai

Prosentase Rekapitulasi Hasil Angket Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Untuk Alternatif Jawaban Nilai A : $5 \times 32 = 160$
2. Untuk Alternatif Jawaban Nilai B : $4 \times 460 = 1840$
3. Untuk Alternatif Jawaban Nilai C : $3 \times 174 = 522$
4. Untuk Alternatif Jawaban Nilai D : $2 \times 30 = 60$
5. Untuk Alternatif Jawaban Nilai E : $1 \times 0 = 0$

$$696 = 2582$$

Nilai yang diharapkan adalah: $5 \times 696 = 3480$

Selanjutnya digunakan Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$F = 2582$$

$$N = 3480$$

$$P = \frac{2582}{3480} \times 100\%$$

$$P = 74,20 \%$$

Dari prosentase di atas dapat diketahui bahwa jumlah prosentasenya berjumlah 74,20 %, maka dapat dikatakan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu cukup baik.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kebanyakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007.

Berdasarkan survey lapangan, penulis melihat bahwa pembangunan yang ada Di Desa Rambah Hilir pada umumnya telah dilaksanakan. Ini dapat dilihat dengan adanya bangunan yang telah didirikan seperti gedung Paud, TK, Posyandu, Perbaikan jalan maupun jembatan dan lain-lain. Dimana pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang lulus perengkingan artinya pembangunan yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip (PNPM) Mandiri Perdesaan berdasarkan hasil penelitian dan prosentase kuisioner (Angket). Adapun hasil prosentasenya adalah 74,20% dan dapat dikatakan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Cukup baik.

6.2. Saran

Demi mencapai Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir yang lebih baik lagi, penulis ingin memberi saran kepada pemerintah, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir, sebagai berikut: Sebaiknya fungsi dan peran pelaku (PNPM) Mandiri Perdesaan harus dapat berjalan dengan baik agar tujuan (PNPM) Mandiri Perdesaan dapat tercapai dengan baik pula yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembangaan dalam

penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Dan Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Reka Cipta.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamin, Zulkarnain. 1995. *Struktur Perekonomian dan strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: UI Pres.
- Dunn, Wiliam, N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Eko, Sutaro. 2004. *Repormasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Hamim, Sufian, Indra Muchlis Adnan. 2005. *Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru.
- 2006. *Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Pekanbaru.
- Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Grasindo.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mudiono Dkk. 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Moekijat, Drs. Pengembangan Organisasi. Bandung : Alumni. 2000.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo.
- Prayitno, Hadi. 1987. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta : BPFE
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Strateginya)* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: Aditama.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.

-----2005. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Widjaja, H. A. W. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zulkarnain. 2001. *Membangun Ekonomi Rakyat (Persepsi tentang pemberdayaan usaha kecil dan koperasi di Riau)*. Riau : UNRI Press.

Non Buku:

PENJELASAN (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Sumodiningrat, Gunawan, 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas

http://Teguh-Kurniawan.web.ugm.ac.id/publikasi/pengawasan_Deptan_TK.pdf 04 Oktober 2011